PERAN PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh :

BADRUSSYAMSI

NIM : C04212050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Badrussyamsi
NIM	:	C04212050
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
B6F2AADF493508576
6000
ENAM RIBU RUPIAH

BADRUSSYAMSI
C04213028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Badrussyamsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, November 2017

Pembimbing,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, LC, MA

NIP:197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Badrussyamsi NIM. C04212050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, LC, MA.
NIP: 197511032005011005

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP:196506151991021001

Penguji III,

Samsul Anam, MM.
NIP: 196803072008011017

Penguji IV,

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NUP: 201603311

Surabaya, Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP: 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : BADRUSSYAMSI
NIM : C04212050
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : syamsi421@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepadaPerpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2018
Penulis

(BADRUSSYAMSI)
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.** Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Sumenep dalam pembangunan ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah.

Metodeologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, serta data-data dokumen yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, diteliti, dan disimpulkan dengan pola induktif sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar sangat berperan penting untuk pembangunan ekonomi masyarakat Gapura, terbukti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) total penyalurannya dalam satu tahun mencapai sebesar Rp 472.305.400,-. CSR tersebut untuk membantu antar sesama dengan harta yang dimiliki perusahaan. Sumber dana CSR tersebut diambil dari 2,5% berasal dari dana yang dicadangkan dari total laba bersih perusahaan, sehingga PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sangat bertanggungjawab terhadap sosial masyarakat dengan disalurkannya dana CSR terhadap berbagai kegiatan seperti bantuan dana pendidikan, bantuan dana kesehatan, tunjangan ekonomi masyarakat, bantuan tenda pasar, serta bantuan terhadap pembangunan masjid dan madrasah. Selain dana CSR, PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga sangat berkontribusi besar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sumenep yaitu Rp. 5,938,246,000-, pada tahun 2016, sehingga dalam prakteknya segala kegiatan *funding* atau *leanding* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah yaitu: menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran bahwa pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus senantiasa meningkatkan usahanya dalam membangun perekonomian masyarakat Sumenep baik melalui produk *funding* atau *leanding* secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumenep. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep harus ikut andil dalam mengkawal proses dan kinerja PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Kata kunci : Kontribusi, BPRS Bhakti Sumekar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL dan GRAFIK xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Kajian pustaka 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metodologi Penelitin 18

J. Sistematika Penelitian 23

BAB II LANDASAN TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

A. Pembangunan Ekonomi 25

1. Pembangunan Ekonomi Daerah 30

2. Manajemen Pembangunan Daerah 33

B. Ekonomi Syariah 35

1. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 37

2. Ciri-ciri Ekonomi Syariah 39

3. Tujuan Ekonomi Syariah 40

4. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Ekonomi Syariah 41

5. Karakteristik Ekonomi Syariah 44

C. Kesejahteraan Masyarakat 48

BAB III PROFIL PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 53

1. Latar Belakang PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 53

2. Permodalan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 54

3. Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 56

4. Susunan Pengurus PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 58

5. Visi-Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 59

B. Produk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 60

C. Penyaluran Dana Sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Data Penyaluran Bantuan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 68

E. Tanggungjawab Sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep .. 70

F. Dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep 72

BAB IV ANALISIS PERAN PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep..... 74

B. Analisis Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL dan GRAFIK

Halaman

Tabel 1.1 76

Tabel 1.2 76

Tabel 2.1 78

Tabel 3.1 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan pembangunan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga ini juga berkewajiban untuk menyalurkan dananya kepada pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berfungsi sebagai fasilitator yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas peredaran uang baik nasional maupun negara.[1]Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari perbankan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 4, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang

[1] Gamela Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, denganmemecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan,penganggurandan pemerataan.[2]

Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi ini. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negarapun dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.[3]

Dalam kehidupan bermasyarakatsedikit banyakakan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.Dengan demikian hanya dengan tolong-menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.[4]

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kearah peningkatan taraf hidup masyarakat.Sangat perlu pemerintah menunjang keberadaan lembaga perbankan ini sehingga

---

[2] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 8.

[3]Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7.

[4] Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa beroperasi secara maksimal disetiap daerah.Disamping itu eksistensi dan peran operasional perbankan di setiap negara, kota dan daerah perlu adanya korelasi pada karakter masyarakat dimana perbankan itu beroperasi. Sehingga setiap produk yang dikelola dan ditawarkan pada calon nasabah atau masyarakat bisa terpenuhi dan terjual sesuai target perbankan itu sendiri. Juga dengan berdirinya lembaga perbankan di setiap desa bisa memberi kontribusi yang besar pada kesejahteraan dan kemaslahatan pada daerah berdirinya lembaga perbankan tersebut.

Sebab pentingnya peran dan kontribusi lembaga perbankan ini dalam pembangunan ekonomi masyarakat, maka secara khusus Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengatur operasional sebuah lembaga perbankan yang berbasis syariah agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dan melanggar syariah. Para ulama melaksanakan kesepakantan bersama dalam mewujudkan bank yang bebasis non ribawi di Indonesia, yakni dengan diselenggarakannya lokakarya bunga bank dan perbankan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990 di Bogor. Hasil lokakarya tersebut ditindak lanjuti dalam musyawaroh nasional IV Majlis Ulama Indonesia yang berlangsung di Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Musyawarah Nasional IV MUI, telah dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Berbasis *Non Ribawi* di Indonesia.[5]

[5] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu beberapa organisasi masyarakat juga ikut andil dalam berdirinya perbankan yang berbasis syariat Islam dengan mengeluarkan beberapa fatwa sebagai berikut:

1. Menurut Dawam Raharjo dan Muhammad syafi'I Antonio, bahwa Majlis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum perbankan (1968 & 1972) yang pada pokoknya menetukan bahwa riba hukumnya haram dengan *Nash Sharih* al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menyarankan kepada PP. Muahammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konseps sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Menurut Rifyal Ka'bah dan Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa sesungguhnya Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama juga telah memutuskan masalah Bank dan pembungaan uang melalui beberapa kali sidang. Adapun isi keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan dengan sikap yang lebih berhati-hati bahwa bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang Bandar Lampung (1982). Dari keputusan tersebut Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menetukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, anatara lain menyetujui berdirinya Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.[6]

[6] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah juga menyadari pentingnya peran perbankan sebagai perantara keuangan (*intermediary financial in stitution*), pemerintah dengan otoritas dan kewenangannya secara terus menerus melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi dan peran lembaga tersebut sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional.Salah satu upaya peningkatannya adalah melalui kebijakan yang dikenal dengan kebijakan deregulasi.[7]

Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil.Kegiatan berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat. Dalam hal ini, undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "Bank berdasarkan prisip bagi hasil" untuk menyebut Bank Syariah atau Bank Islam (*Islamic Banking*).[8]

Dengan adanya beberapa fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Undang-undang yang di keluarkan pemerintah, maka terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Perbankan yang berbasis Syariah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan meningkatkan dan

---

[7] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 27.

[8] Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 Tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH Notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, Nomor. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar – Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkannya dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep.

Sebagai sebuah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berperan sebagai penghimpun (*funding*) dan penyalur (*leanding*) terhadap masyarakat yang membutuhkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaplikasikan beberapa macam produk, seperti Gadai Emas (*Ar-Rahn*), Tabungan (*Ijarah*), dan Pinjaman (*Al-Qard*), sehingga dari hasil itulah PT. BPRS Bhakti Sumekar mendapatkan jasa produksi, dana kesejahteraan, dan dana sosial yang dimasukkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan.

Selain itu, PT. BPRS Bhakti Sumekar juga sangat berperan aktif terhadap pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep, hal itu dibuktikan dengan eksistensinya PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam setiap kegiatan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu membantu antar sesama dengan harta yang dimiliki perusahaan, maka 2,5% sumber dana CSR perusahaan berasal dari dana yang dicadangkan dari total laba bersih perusahaan dengan total penyaluran sebesar Rp 373,371,900, di antaranya melalui kegiatan, meliputi :

1. Penyaluran pembiayaan kebajikan (*Qard al-hasan*).
2. Penyaluran bantuan kepada bidang sosial yaitu dalam bentuk kegiatan khitanan masal, bantuan anak yatim, bantuan orang tua jompo, kesehatan, pengadaan fasilitas tenda pasar malam dan pembangunan tempat-tempat sampah di setiap daerah Kabupaten Sumenep.
3. Penyaluran bantuan kepada bidang keagamaan yaitu dalam bentuk kegiatan hari besar Islam, pembangunan masjid dan pondok pesantren,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyaluran bantuan kepada bidang pendidikan yaitu dalam bentuk bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi dan tidak mampu.[9]

Kiprah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga terlihat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep tidak terkecuali di Kecamatan Gapura. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasar latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul "Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah Penelitian diatas, maka Penelitiakan mengindentifikasikan masalah yaitu:

1. Bagaimana pembagian presentase dana bersihPT. BPRS Bhakti Sumekaryang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perhitungan jumlah dana sosial yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mengatur pengelolaan dan pendistribusian serta pembagian dana sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

[9]https://www.maduraterkini.com/berita-sumenep/aset-bprs-bhakti-sumekar-terbesar-ketiga-di-indonesia.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kegiatanapa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep atas dana sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
5. Bagaimana upaya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah Kecamatan GapuraKabupaten Sumenep.
6. Bagaimana aturan Islam terkait pembangunan ekonomi derah dari segi teori dan teknis.
7. Bagaimana masyarakat daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenepmemanfaatkan pembangunan ekonomi daerah oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini peneliti buat, agar supaya penelitian yang diteliti lebih terarah dan jelas, sehingga penelitimenjadi lebih fokus sesuai dengan masalahnya. Berikut pembatasan masalahnya:

1. Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenepdalam upaya pembangunan ekonmi daerahKecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenepdalam upaya pembangunan ekonomi daerahKecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan GapuraKabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang peneliti ingin dicapai dalam Penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua arah, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian dapat menambah menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Sumenepterhadap upaya pembangunan ekonmi daerah di Kabupaten Sumenep. Selain itu juga dapat menambah literatur serta referensi tambahan yang dapat digunakan ataupun dikembangkan sebagai bahan informasi bagi Penelitian selanjutnya khususnya tentang peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai bukti tertulis bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep selain berkontribusi terhadap dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sumenep juga mempunyai peran besarpada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta terhadap pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan bagi BPRS-BPRS lainnya dalam meningkatkan peran BPRS terhadap pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan kata-kata yang dianggap penting terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain.Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat".Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, lembaga, atau organisasi.

Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keikutsertaan PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai salah satu Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep, baik yang berkaitan dengan kegiatan *funding/leanding*, pengelolaan dana sosial, maupun pembangunan langsung di daerah Kabupaten Sumenep.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumnep

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya daerah yang dilakukan oleh lembaga dan pemerintah daerah dengan membentuk kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi di daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep merupakan pembangunan ekonomi yang turun langsung kepada masyarakat, baik yang berupa tunjangan dana sosial, pendidikan, pengadaan fasilitas pasar, sebagai wujud tanggung jawab perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kesejahteraan sosial masyarakat atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).

3. Perspektif EkonomiSyariah

Pengertian Ekonomi Syariah menurutmenurut menurut Muhammad Abdullah abdullah al-'Arabi, Pengertian Ekonomi Syariah ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai setiap lingkungan dan masa.

Menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.[10]

H. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti juga menelaah hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dengan judul "Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya Pembangunan Ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif Ekonomi Syariah".

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menghindari kesamaan hasil, kesamaan pembahasan atau plagiasi dalam penelitian ini, maka peneliti

[10]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*.(Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menjelaskan topic penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Pertama,*Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi*, penelitian ini ditulis oleh Alvi Shidqi, dalam penelitian ini dijelaskan; Konsep pengembangan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera melalui prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, partisipasi dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Tujuan pengembangan ekonomi masyarakat terutama adalah usaha meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan.Ruang lingkup pengembangan ekonomi masyarakat mencakup segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.Bentuk pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pengembangan aset manusia,pengembangan aset modal, pengembangan aset sosial.Sedangkan langkah program pengembangan ekonomi masyarakat adalah tahap identifikasi/assesment, tahap perencanaan program, tahap penilaian program.Dilihat dari konsep pengembangan ekonomi masyarakat, terdapat tiga peran Bank Syariah Mandiri bagi pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu pengembangan aset manusia, pengembangan aset modal, dan pengembangan aset sosial.[11]

Kedua, *Pembangunan dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya,* buku ini ditulis oleh Prof. H. Ismail Nawawi, dalam buku ini

[11]Alvi Shidqi, *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi,* (Sripsi; UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa Pembangunan identik dengan perubahan, dan perubahan merupakan ciri manusia yang dinamis dan berbudaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu golongan/masyarakat selagi masyarakat itu tidak mau merubah kondisinya sendiri. Demikian nilai-nilai pembangunan secara religi yang harus dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. sehingga pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan tingkat *income* masyarakat dan individu sehingga tidak akan terdapat perbedaan atas target ekonomi yang akan diraih oleh negara-negara maju dan berkembang.[12]

Ketiga, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, penelitian ini ditulis oleh Novia Nengih, dalam penelitian ini dijelaskan; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalammengimplementasikan *financial inclusion* diIndonesia.*Financial inclusion* merupakanproses untuk memberikan akseskeuangan formal bagi masyarakat miskin danperpenghasilan rendah(*unbankable people*). Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dankuantitatif (*mixed research*). Analisis data kualitatif menggunakan teknikanalisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkahbesar, yaitu*open coding, axial coding, dan selective coding*.Penelitian ini membuktikan bahwaperbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan *financialinclusion,* ditunjukkan denganpertumbuhan yang signifikan pada funding dan financingtahun 2010-

[12] Ismail Nawawi, *Pembangunan dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dankondisi keuangan perbankan syariah baik.[13]

Keempat, *"Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan"* penelitian ini ditulis oleh Nindy Petriyati. Dalam penelitian ini dijelaskan; Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam lima tahun terakhir ini terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Pasca krisis perekonomian Kabupaten Sumenep tumbuh positif, dan pada Kabupaten Pamekasan percepatan laju ekonomi di dongkrak oleh beberapa sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) sektor unggulan pada Kabupaten Sumenep dan Pamekasan adalah sektor pertanian dengan nilai yang sama yaitu 3,33.Sedangkan dengan menggunakan analisis *Shift Sharedari* hasil perhitungan *Differential Shift* (DS) Kesembilan sektor Kabupaten Sumenep memiliki nilai DS0 atau bernilai positif, sedangkan pada Kabupaten Pamekasan hanya delapan sektor yang memiliki nilai positif dan satu sektor bernilai negatif. Sektor paling menonjol pada Kabupaten Sumenep adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai 106.475,43. Pada Kabupaten Pamekasan sektor paling menonjol adalah sektor

[13]Novia Nengsih, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian dengan nilai 24.002,85.[14]

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, empat penelitian diataslah yang dianggap paling berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan sekarang ini, akan tetapi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait kasus yang diangkat tidaklah sama, peneliti fokus pada apa sajaperan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upayapembangunan ekonomi daerahKecamatan Gapura Kabupaten Sumenepdalam perspektif ekonomi syariah.

Kelima, *"Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah"* penelitian ini ditulis oleh Budiantoro Hartono. Dalam penelitian ini dijelaskan; Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Indesk Williamson dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 cenderung relatif meningkat.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil investasi swasta perkapita (X1) menunjukkan t hitung sebesar -2,362, variabel ratio angkatan kerja (X2) menunjukkan t hitung sebesar -2,128, variabel alokasi dana pembangunan perkapita (X3) menunjukkan terhitung sebesar 7,184 dengan angka signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 1,899, dengan angka signifikansi sebesar 0,000 (0,000 $\bar{}$ 0,05) sehingga dapat

[14]Nindy Petriyati, *Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.*(Skripsi; UPN – VETERAN, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita secara bersama – sama berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita sebesar 93,7 persen sedangkan sisanya sebesar 6,3 persen dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.[15]

I. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian deskripsi atau *Discriptive Research* yaitu penelitian yang dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis untuk mengetahui suatu masalah, peristiwa dan keadaan yang sebenarnya.[16]

   Hasil dari penelitian ini, merupakan hasil murni yang diambil dari dokumen kegiatan dan penjelasan pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam melaksanakan program-program baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau tidak langsung dan pengawalan Pemerintah Kabupaten Sumnep terhadap proses pelaksaan program PR. BPRS

[15]Budiantoro Hartono, Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, (Tesis.. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008).

[16]Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*… 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hasil data mengenai implementasi peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah.Sehingga data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal langsung dari sumber penelitian[17].Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang laporan keuangan pembagian danasosial dan dana kesejahtraanPT. BPRS Bhakti Sumekar kepada Pemerintah Kabupaten Sumenepdan juga data-data yang terkait kegiatan yang menunjang pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumnep.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang

[17] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan istilah interview (wawancara)[18]. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar Ibu Endang Selaku Kepala Bidang Oprasional BRPS Bhakti Sumekar, dan juga pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep yang merupakan pengelola sosial tersebut Bapak Imam Hidayat, SE. Sebagai KASI Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Serta Bapak Nur Aidi, S. Sos Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[19] Data sekunder meliputi data yang dihasilkan dari beberapa kajian buku atau literature.

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini diambil dari beberapa buku atau literatur sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Buku Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul Bank Syariah dari teori dan praktek.
b) Buku Rahmadi Usman dengan judul Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.

[18]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.
[19]Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Departemen Agama Republik Indonesia dengan judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan, peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran kejadian sesuai realita untuk menjawab pertanyaan.[20]

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain, wawancara merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi.[21]

---

[20] Juliyansyah Nor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 140.
[21] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar dan pihak pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan informasi sehingga bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian melalui dokumen [22]

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.[23]

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikeola menggunakan analisis deskriptif. Adapum teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh baik dari kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan dari data dengan penelitian.[24]

b. *Organizing,* yaitu penyusunan kembali data yang telah didapatkan secara sistematis.[25]

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah

[22]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[23] Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, 141.
[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 243.
[25]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[26]

5. Teknik analisis data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata atau secara tertulis.[27]

Metode ini bertujuan untuk membuat gambaran mengenai objek penelitian secaraa sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan keadaan yang diteliti.[28]

J. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika Penelitian yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dan skripsi ini. sistematika Penelitian ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penelitian ini adalah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodepenelitian, dan sistematika penelitian.

---

[26]Ibid, 246.
[27]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[28] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, pada bab ini dibahas tentang teori pembangunan ekonomi daerah, teori pembangunan ekonomi perspektif syariah, danteori kesejahteraan masyarakat yang menjadi pedoman tema penelitian ini dan sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Bab ketiga, adalah bab data penelitian yang membahas implementasi peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Syariah, meliputi: profil BPRS Bhakti Sumekar, visi dan misi BPRS Bhakti Sumekar, peraturan daerah, penyaluran dana sosial, pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep.

Bab keempat, adalah analisis data, memuat analisis tentang implementasi peran PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah dalam perspektif ekonomi Syariah, dan laporan keuangan pembagian dana sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep serta aturan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemangku otomi daerah terhadap kinerja PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar, sehingga mampu memaksimalkan perannya dalam mengelola dana sosial dengan baik untuk membangun ekonomi daerah yang nantinya bisa menjadi acuan bagi seluruh BPRS di Indonesia, baik dalam bentuk operasional maupun prakteknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

A. Pembangunan Ekonomi

Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.[1]

Pembangunan ekonomi menurut Irawan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.[2]

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan dalam lapangan industry dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun.

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi

[1] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika, 1985), 13.
[2] Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: BPFE, 2002), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.[3]

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis, apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja.

Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang *Ekonomi-Politik* di abad ke delapan belas, namun akarnya dapat ditelusuri sampai pada hampir 25 abad yang lalu, ketika Plato dalam salah satu dialognya meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk mencapai e*udaimonia,* yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi, sedangkan Adam Smith yang di dalam buku *The Wealth of Nations* meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional.[4]

Teori Pembangunan *(Community Development Teory)* merupakan suatu proses perencanaan sosial *(sosial plan)* yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun ukuran

---

[3]Suryana, *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), 5.
[4] Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu :

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat di setiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI *(Physical Quality of Life Indeks)*yang berasal dari tiga indikator meliputi angka harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitsi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu, konfigurasi kekuatan sosial di suatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.[5]

Menurut Suryana terdapat empat teori atau model pembangunan ekonomi yang bisa diterapkan khususnya dalam pembangunan di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

1. Model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Tujuan pokok strategi ini adalah meningkatkan laju produksi (GDP). Kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan faktor utama dan merupakan parameter ekonomi dan sosial yang paling baik untuk tingkat hidup suatu masyarakat.
2. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Sasaran yang dicapai adalah peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan produksi dengan cara redistribusi pendapatan melalui perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

[5] Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia,* (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Model pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan. Tujuan strategi ini mengurangi kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP (*Gross National Product*) atau peningkatan pendapatan kelompok miskin. Strategi ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijaksanaan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas, reorientasi produksi melalui proyek padat karya dan relokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dan konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan sektor informal di perkotaan.
4. Model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*The Bassic Necessary Oriented*). Antara lain, pertama tercapainya investasi yang tinggi dengan pemanfaatan tehnologi tepat guna dan penggunaan sumber daya alam dalam produksi secara efisien. Kedua adanya perubahan dalam pola redistribusi dengan melakukan mobilitas pengangguan, relokasi pelayanan jasa umum dan *land reform*. Ketiga, perlunya aspek perubahan kelembagaan, yang meliputi partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah.[6]

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diartikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterkana dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya

[6] Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Selemba Empat, 2000), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.[7]

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan aktifitas ekonomi yang meliputi bidang yang berhubungan langsung dengan alam, seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan sebagainya.[8]

Secara tidak langsung bahwa sistem sosial budaya memiliki sifat pendorong maupun membatasi perilaku yang dapat berubah. Dapat dikatakan bahwa variasi-variasi atau keputuan-keputusan individu merupakan bentuk inovasi yang dapat memicu perubahan. Disamping itu unsur-unsur internal tersebut tidak dapat sepenuhnya terlepas, namun diwarnai oleh unsur-unsur eksternal yang berasal dari lingkungan di luar yang menyebabkan sistem perekonomian menjadi semakin kompleks.

1. **Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis dari pemerintah. Pemerintah daerah mengembangkan segala bidang produksi baik dalam bidang pertanian, perdagangan, serta menciptakan lapangan kerja sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai

[7] Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.
[8] Ruslan Prawiro, *Ekonomi Sumber Daya*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[9]

Menurut Lincolin Arsyadpengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

1. Suatu yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu asministrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.[10]

---

[9] Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: FEUI, 2003), 26.
[10] Lincolin Arsyad, *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbanyak lapangan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah, sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Menurut teori ekonomi neo klasik, ada dua konsep dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi daerah.

Sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan jika modal bisa mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya.

Timbulnya peningkatan kinerja akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi.[11]

[11] Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.[12]

2. **Manajemen Pembangunan Daerah**

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Apabila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kepada pengusaha

   Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan,

[12] Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah,* (Jakarta: Bumii Aksara, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan demikian maka pihak investor dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan kegiatan usahanya.[13]

2. Memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan

   Strategi atau kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap keyakinan investor dalam menjalankan jenis usahanya. Pemerintah daerah harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketidakadaan dukungan yang diperlukan.

3. Mendorong sektor jasa dan perdagangan

   Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk, semakin dekat penduduk maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan lebih baik. Pemerintah daerah perlu berupaya agar konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil.

[13] Budi Cahyono, *Analisis Pembangunan Daerah*, (Semarang: Gramedia Pustaka Utama, 2005),59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Meningkatkan daya saing pengusaha daerah

Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.

B. Ekonomi Syariah

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.[14]

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat yang dibingkai dengan syariah.[15]

---

[14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.
[15] Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakteknya kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam :[16]

1. Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia.
2. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.
3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan syariat Islam.

Dalam Islam empat sifat ysng harus dijadikan landasan manusia dalam berekonomi yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*).[17]

[16] Doddy Rudianto, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indoensia* (Jakarta: Golden Terayon, 1985), 17.
[17] Chapra Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPII, 2001), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya dalam agama Islam perilaku dan tingkah laku mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup baik yang bersifat materi ataupun non materi yang baik dan halal, serta bagaimana mengolah sumber daya yang ada dengan baik dan bermanfaat bagi semua.[18]

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:[19]

a. Jenis sumber daya alam yang ada merupakan pemberian dan ciptaan Allah Swt, sehingga perlu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, tidak boleh berlebihan dan seenaknya sendiri klarena itu bukan miliki kita.
b. Dalam islam pendapatan yang diperoleh secara tidak sah atau kurang jelas hukumnya tidak diakui, dan mengakui pendapatan atau kepemilikan pribadi dengan batas-batas tertentu yang memiliki hubungan dengan kepentingan orang banyak.
c. Dalam kegiatan ekonomi syariah, bekerja merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utamanya. Dalam islam telah diajarkan untuk tidak bermalas-malasan untuk mencari rezeki, untuk itu bekerja sangat dianjurkan oleh agam islam untuk mendapatkan rezeki berupa harta atau matteri dengan berbagai cara, namun ada batasan yang harus diikuti agar tidak salah langkah.

[18]Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam, Khalifa*, (Jakarta: Al-Kautsar Group, 2004), 8.
[19] M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta, Media Inspirasi, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang kaya, tidak boleh hanya diam di tempat atau dibuat sendiri namun harta tersebut diharuskan untuk selalu mengalir di dibagi dengan tujuan bisa membantu orang-orang yang kurang mampu dengan meningkatkan besaran produk nasional agar tercapai suatu kesejahteraan.

e. Tidak ada perbedaan hak yang didapat oleh semua orang, semua orang sama punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang telah direncanakan sedemikian rupa hingga berguna untuk kepentingan orang banyak.

f. Seorang muslim harus punya hati dan perasaan yang selalu taat dan tunduk pada Allah serta mempercayai semua yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dengan harapan kita sebagai umat muslim bisa terdorong untuk selalu berbuat yang benar dan menghindari sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan hukum islam.

g. Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk selalu membersihkan harta yang kita dapat, karena kita tidak tahu apakah benar harta tersebut diberikan pada kita atau itu titipan untuk orang yang membutuhkan. Untuk itulah kita diwajibkkan untuk berzakat, zakat merupakan salah satu jalan yang ahrus anda lakukan jika harta anda sudah mencapai batas ukur yang ditentukan (nasab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Semua kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dilarang mendandung unsur riba, gharar, dzulum, dan unsur lainnya yang diharamkan menurut syara' sedikitpun dalam berbagai bentuk seperti panjaman uang dan lain sebagainya. Karena dalam islam diharamkan suatu kegiatan ekonomi yang mengandung kedzaliman, tipu muslihat, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Allah.

i. Aktivitas muamalah yang terjadi didalamnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada sedikitpun unsur paksaan antara beberapa pihak. Jadi mereka melakukan muamalah atas kehendak dan hati nurani sendiri.

Jadi, prinsip yang dimiliki oleh ekonomi syariah, segala bentuk kegiatan atau penentuan hukum semua dilandaskan atas nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

2. Ciri-ciri Ekonomi Syariah

Adapun ciri-ciri ekonomi syariah dalam Islam adalah sebagai berikut:[20]

a. Kegiatan perekonomian dalam Islam bersifat pengabdian

Dalam islam semua kegiatan ekonomi diharapkan sebagai wahana untuk mencari keridloan Allah tidak terfokus kepada mencari materi dan materi semata, maka dengan niat untuk

[20] Abul A'la Al-Maududi, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam,* terj. Adnan Syamni, (Jakarta, Media Dakwah: 1985), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beribadah kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu rezeki dan pahala.

b. Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur

Segala bentuk kegiatan ekonomi dalam islam difokuskan untuk berbagi antar sesama, memakmurkan bumi dengan segala kegiatannya, mencapai kehidupa yang layak dan benar sebagai tanda syukur kita kepada Allah.

c. Ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam ekonomi syariah memiliki acuan bahwa harus selalu bersama, susah senang ditanggung bersama, dilatih untuk selalu peka terhadap kondisi sekitar kita yang mmebutuhkan. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan yang sangat mulia dan baik, yaitu :

a. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.

Hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini hanya semata-mata untuk menyembah kepada Allah Swt, maka dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa nanti di akhirat semua amal dan perbuatan manusia akan dipertanggung jawabakan di hadapan-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita melakukan aktivitas ekonomi karena ingin mendapatkan sebuah kemakmuran hidup di dunia, namun dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti.

c. Meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah.

Kegiatan ekonomi menurut pandangan islam adalah suatu aktivitas yang mampu memberikan damapak baik kepada semua orang atau masyarakat. Ekonomi syariah menjunjung nilai sosial, tidak ada perbedaan status semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran dan bebeas untuk berkreasi.

d. Menghindari kekacauan dan kerususuhan

Tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil, sehingga semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan dimanapun mereka berada.

4. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Ekonomi Syariah

a. *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara tehnis, *mudhārabah*adalah akad kerjasama usaha antara dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.[21] Adapun landasan *Mudhārabaha* adalah sebagaiberikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20 yaitu:

   ...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ ...

   Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah…" (QS. Al-Muzzammil: 20)

2. Al-Qur"an surat Al-Baqarah ayat 198 yaitu:

   لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ...

   Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dariTuhanmu…" (al-Baqarah: 198)

3. Al-Hadist

   Atinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudhārabah*, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudhārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[22]

---

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

[22] Ibid., 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun dasar hukum musyarakah dalam Al-Quran surat Shaad ayat 24, yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini" (QS. Shaad ayat 24)

c. *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Adapun dasar hukum *Muzara'ah*dan *Mukhabaroh*adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّااَكْثَرَالْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِيالْاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

Artinya : Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah Saw. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari).

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya:Dari Ibnu Umar: "Sesungguhna Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim)

5. Karakteristik Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis muamalah Islami tentunya sejalan dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersindiri. Adapun jenis karakteristik ekonomi Islam, sebagai berikut:[23]

[23] Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishad al Islamy Madkholun wa Manhajun*, (Darussalam, Kairo, 2010), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Spirit ketuhanan *(Robbaniyah)*

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan, Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perkonomian. Manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah: 30).

Kemudian dilanjutkan dalam Al-Hud ayat 61;

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Al-Hud : 61)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat-ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nanti dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perkonomiannya.

b. Keseluruhan *(Syumuliah)*

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk didalamnya aspek perekonomian.

Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarkan atas kemauannya saja, tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung hal-hal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.

c. Fleksibilitas *(murunah)*

Kaidah-Kaidah dalam Islam bersifat *sholihun likulli zaman wa makan*. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan *tsawabit* (sesuatu yang sudah tetap) serta *mutaghayyirat* (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal *ushul* (pokok) dalam agama dan *furu'* (cabang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamlah yang menyesuaikan keadaan, dan bukannya keadaan yang merujuk pada hukum Islam. Sisi yang bisa diterima adalah ketika syariah yang *sholih likulli zaman wa makan* ini mampu menghukumi perkembangan zaman.

d. Keseimbangan *(tawazun)*

Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian serta keseimbangan antara boros dan kikir. Islam juga memberi keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt. salam surat Al-Qashash ayat 77 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.

e. Keuniversalan *(alamiyyah)*

Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi, karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam Al - Qur'an:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Arttinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al -Anbiyạ :107)

Unsur-unsur di atas menggambarkan bagaimana Islam mengatur manusia dalam menjalankan perekonomian dan bisnisnya di dunia tanpa mengenyampingkan kebaikan dan keberkahan sehingga hubungan antara manusia dan manusia dapat berjalan dengan baik. Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (*muamalah*).[24]

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.[25]

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sangat dibutuhkan oleh msyarakat, sebagaimana diakui dalam Islam, yaitu memberi hak-hak yang

[24] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.
[25] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti kepada masyarakat dan menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.[26]

Dalam surat Al-Qashas ayat 77 yang menerangkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi, adalah sebagai berikut:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan carilah apa yang telah dianugrakan Allah kepadamu (kebahagiaan) Negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka (bumi), sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Qs. Al-Qashash:77)[27]

Garis besar dari fungsi kesejahteraan ekonomi islam dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dasar ekonomi, serta berbagai kriteria dari pengeluaran sosial. Prinsip-prinsip mengenai fungsi kesejahteraan ekonomi Islam tadi, secara singkat dapat dikemukakan seperti dibawah ini:

a. Pemilikan Allah terhadap alam semesta.
b. Aktivitas ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip persaudaraan, persamaan, dan perwalian ekonomi.
c. Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran, saling membantu.
d. Allah Swt menciptakan perbedaan dalam tujuan, keberanian, perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi,

[26] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 7.
[27] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seorang manusia bergantung pada lainnya untuk dapat memuaskan kebutuhankebutuhan ekonominya.[28]

Disisi lain, pengertian kesejahteraan sosial dituangkan kedalam undang-undang nomor 6 tahun 1974, tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila".[29]

Banyak faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diukur melalui faktor-faktor produksi, antara lain: [30]

1. Modal

   Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskindalam proses peningkatan mutu kehidupannya.

2. Ketrampilan

---

[28] Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 19.

[29] T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984), 33.

[30] Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak,* (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara,1992), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan faktor produksi yang sangat startegis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.

3. Teknologi

   Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam berproduksi.

4. Lahan Usaha

   Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi: [31]

a. Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
b. Jasa Pelayanan (*Service)* berupa bimbingan dan penyuluhan.
c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

[31] T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
c. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.[32]

[32] Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Jaya, 2003), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Latar Belakang PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah.Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, di mana pada gilirannya lembaga keuangan tesebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi Daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatanggani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta tanggungjawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekruitmen, pelatihan dan pembinaan.[1]

2. Permodalan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Berdasarkan akta pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, SH yang telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13 Agustus 1999 dari notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, SH., modal dasar Bank terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 250.000.000,- dengan komposisi kepemilikan saham (sebelum Akuisisi) adalah sebagai berikut: [2]

[1] https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/latar-belakang
[2] https://www.bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/permodalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Poeji Harixon 450 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp. 225.000.000,-
2. Poeji Hartono 50 lembar saham @Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,-

Dengan disetujuinya akuisisi PT Bank Perkriditan Rakyat Dana Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep 490 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp. 245.000.000,-
2. Perseorangan 10 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-

Selanjutnya penambahan modal disetor dilakukan dari Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor. 4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27-05-2002.

Peningkatan Modal serta Perubahan Nilai Nominal Saham tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny. Sukarini, SH, notaris di sidoarjo dengan perubahan sbb :

1. Modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah).
2. Modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perubahan nominal saham menjadi Rp. 5.000.000,- perlembar, dan mendapat pengesahan Mentri Kehakiman RI dan HAM RI No. C-01.389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19-01-2004 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep 8,000 lembar saham = Rp. 83.300.000.000,- (99,99%)
2. Perseorangan 1 lembar saham = Rp. 5.000.000,- (0,01%).

3. Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta NotarisYanita Poerbo, SH No.64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-392.HT01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2001 dengan surat Persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan persetujuan dari Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT.BPRS Bahkti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam Akta Notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat pengesahan Depertemen Kehakiman RI dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia No.6/606/Dpbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Selanjutnya izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara syariah mulai tanggal 22 Oktober 2004.[3]

4. Susunan Pengurus PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
   a. Pemilik PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep
   b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

      KH. Muhammad Romdlan Siraj, SE, MM.
   c. Dewan Komisaris PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:
      1) H. Fen A. Efendi, SE, Msi, MM
      2) Drs. H. Mohammad Toha, Msi
   d. Direksi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:
      1) Drs. Ec. H Abdus Sukur
      2) Sanusi Anwar, SE
      3) Novi Sujatmiko, ST

[3] https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/status-hukum-dan-riwayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pegawai/Karyawan

Nama-nama terlampir.[4]

5. Visi-Misi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya"

b. Misi

1. Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah.
2. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
3. Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.[5]

B. Produk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Produk Pendanaan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diaplikasikan adalah:

a. Tabungan Barokah, Layanan tabungan bagi Masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip wadi'ah (titipan).

b. Tabungan Simpanan Pelajar iB, Layanan tabungan khusus bagi para pelajar dengan prinsip wadi'ah (titipan) yang diterbitkan secara

[4] https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/struktur-organisasi
[5] https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/visi-misi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional oleh Bank-Bank yang berada di Indonesia guna untuk membudayakan menabung sejak dini.

c. Tabungan Qurban layanan tabungan bagi masyarakat umum yang berkeinganan untuk persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip Mudharabah (Bagi hasil).

d. Tabungan Haji, Layanan tabungan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah Haji dengan prinsip wa'diah.

e. Tabungan Umrah, Layanan Tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam merencanakan ibadah Umrah dengan prinsip wadi'ah.

f. Tabungan Hari Raya, Layanan Tabungan yang baru dikeluarkan di tahun 2016 ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk Hari Raya Idul Fitri dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil).

g. Deposito Mudharabah, Layanan simpanan berupa Deposito Berjangka untuk masyarakat umum yang berkeinginan menginvestasikan dana sebagai persiapan jangka panjang dengan prinsip Mudharabah (bagi Hasil).

2. Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diaplikasikan adalah:

a. Pembiayaan Serba Guna

Layanan Pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk melakukan pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan Kendaraan

Layanan Pembaiayaan bagi PNS/Karyawan Swasta, atau institusi yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembelian kendaraan roda dua atau sepeda angin.

c. Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad murabahah (Jual Beli) atau mudharabah (Bagi Hasil).

d. Pembiayaan Talangan Haji

Layanan pembiayaan talangan untuk pendaftaran Haji untuk membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

e. Pembiayaan Talangan Umrah

Layanan pembiayaan talangan umrah untuk membantu anda dalam mewujudkan niat dan impian beribadah Umrah.

f. Pembiayaan Rahn – Emas

Layanan pembiayaan menggunakan prinsip syariah Ar Rahn dengan jaminan berupa emas yang nantinya emas yang menjadi agunan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang dijaminkan.

g. Pembiayaan Pensiunan

Layanan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang akan pensiun atau janda pensiun dan telah memperoleh SK pensiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Pembiayaan Al Qordhul Hasan

Layanan pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

i. Pembiayaan Elektronik

Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta atau institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama untuk hal pembelian barang-barang elektronik, sehingga membantu anda dalam kehidupan sehari-hari.

j. Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Layanan pembiayaan bagi PNS, Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan mengunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk hal kepemilikan rumah.

k. Pembiayaan Pusyar iB

Layanan pembiayaan Modal Kerja tanpa pengenaan margin yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil/Mikro dan atau kepada masyarakat yang akan memulai usaha baru dengan pola kemitraan anatara PT. BPRS Bhakti Sumekar, Badan Amil Zakat, DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep.

l. Pembiayaan Sadar Bersih

Layanan pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) dan berkerjasama dengan pihak water.org

m. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam hal kepemilikan Emas dengan menggunakan akad murabahah (Jual Beli).

n. Pembiayaan Linkage UMKM Primer

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah yang lebih di khususkan golongan usaha yang mengambil bahan baku dari alam menjadi barang jadi (industri, perternakan).

3. Produk layanan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diaplikasikan adalah:

a. Jasa Kiriman Uang

Layanan jasa transfer uang valuta Rupiah antar Bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda.

b. Pembayaran Gaji/Insentif Bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru

Layanan untuk pembayaran gaji karyawan yang bekerja pada institusi/ perusahaan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penyaluran Dana Sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwa perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap semua kegiatannya yang mempengaruhi manusia, komunitas mereka dan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan manusia dan masyarakat. Dengan demikian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus juga bertanggungjawab terhadap lingkungannya ditandai dengan penyaluran dana CSR BPRS Bhakti Sumekaar Sumenep, yaitu:

1. Kegiatan rutinitas, antara lain:
   a. Khitanan massal

      Sudah menjadi kewajiban bagi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk melaksanakan khitanan massal setiap tahun dengan bekerja sama dengan BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia), dengan tujuan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bisa membantu masyarakat demi kesejahteraan bersama.

   b. Jum'at barokah

      Kegiatan ini dilakukan setiap minggu dengan pembagian sembako dan uang santunan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti janda, anak yatim dan lain sebagainya.

   c. Qurban sapi

      Setiap tahun BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan beberapa ekor sapi kepada masjid dan yayasan, kegiatan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai regili dan memberikan sebagian manfaat kepada masyarakat.

d. Bulan bakti gotong royong dan hari gerak PKK

Kegiatan ini berbentuk pasar murah untuk menyambut hari bulan bakti gotong royong dan hari gerak PKK. Barang yang dijualpun masih bersudsidi namun biaya tersebut ditanggung oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar, harga unyuk pembeli adalah harga pokok (harga kulakan).

2. Kegiatan yang sifatnya kondisional

Kegiatan ini dilakukan secara kondisional apabila dianggap perlu dengan adanya ketentuan tertentu sebelumnya, misalnya ada permohonan bantuan renovasi masjid dari lembaga atau yayasan lalu proposal permohonan itu mnendapatkan disposisi dari pimpinan, maka PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana CSR sesuai yang dibutuhkandi proposal tersebut.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam kegiatan yang sifatnya kondisional, antara lain:

a. Sumbangan dana kegiatan mahasiswa
b. Sumbangan dana kegiatan masyarakat
c. Sumbangan dana kegiatan haflatul imtihan
d. Renovasi musholla
e. Renovasi madrasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kegiatan di atas dalam proses penyaluran dana sosial atau dana CSR, BPRS Bhakti Sumekar juga berkeerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Lingkungan Hidup untuk membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses penyalurannya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dana pendidikan

   Kegiatan ini biasanya melalui Dinas Pendidikan yang merekomendasikan langsung siswa atau mahasiswa berprestrasi untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan.

2. Bantuan dana kesehatan

   Kegiatan ini juga melalui Dinas Kesehatan yang memberikan rekomendasi kepada BPRS Bhakti Sumekar meminta untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

3. Pengadaan tempat sampah, dan pot bunga dijalan

   Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup untuk ikut serta membantu pembangunan kabupaten sumenep yang indah, asri dan tentram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Data Penyaluran Bantuan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Data Penyaluran Bantuan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

1. Bantuan untuk pembangunan masjid dan moshalla

Tabel. 1.1
Penyaluran bantuan BPRS Bhakti Sumekar untuk pembangunan masjid dan mushalla tahun 2016.[6]

No.	Keterangan	Nominal
1	Dana sosial untuk bantuan pembngunan gedung Masjid Asy-Syuhada	10,000,000
2	Pembelian 20 semen gresik untuk pembangunan Masjid Al-Kautsar	1,160,000
3	Dana sosial untuk pembangunan Mushollah Al Amir	1,500,000
4	Renovasi Masjid Ro'yul Amin	1,000,000
5	Bantuan karpet sajadah Musholla Nurl falah	600,000
6	Pemblian 20 semen untuk Masjid Al Kautsar	1,160,000
Total		15,420,000

[6] Sumber: BPRS Bhakti Sumekar, Laporan Tahunan 2016. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bantuan berupa uang santunan

Tabel. 1.2
Penyaluran Uang Santunan Dana Sosial BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2016.[7]

No.	Keterangan	Nominal
1	Santunan yatim musollah Rotibul Haddad	1,000,000
2	Dana sosial ponpes Tahfidz Quran Braji Gapura	15,000,000
3	Partisipasi dana Gebyar Ramadan Lazis NU	1,000,000
4	Santunan yatim yayasan Zainul Ipad	500,000
5	Wisudawan terbaik Al Amien	3,000,000
6	Santunan Yatim PKK	6,000,000
7	Santunan Yatim Yayasan Nalhumairoh	500,000
8	Haflah iktibar Lembaga Afifiyah	1,000,000
9	Donatusi untuk BAZ dari BPRS Bhakti Sumekar	50,000,000
10	Santuan pemulung Hari Koperasi	5,000,000
11	Santunan yatim acara Halal Bihalal Karyawan 1437h 2016	5,050,600
12	Beasiswa utk 5 Wisudawan AKPER 2016	1,500,000
13	Sumbangan 1 Muharam 1438 h dan MUSKER	2,000,000
14	Santunan yatim 1 Muharram 1438 H Yab Al Bajigur	2,000,000
15	Santunan anak yatim 10 Muharram 1437h	1,000,000
16	Dana sosial untuk 1 Muharram dan MUSKER NU	2,000,000
17	Dana sosial untutk 1 Muharram SMP Gapura	1,000,000
18	Partisipasi santunan yatim Yayasan Al Humairoh	500,000
19	Bantuan pengibatan mahasiswa magang	300,000
Total		98,350,600

[7] Sumber: BPRS Bhakti Sumekar, Laporan Tahunan 2016. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tanggungjawab Sosial PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Sebagai perbankan yang berpedoman pada ketentuan syariah dalam melakukan aktivitias bisnisnya, BPRS Bhakti Sumekar memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian bisnis.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu komitmen BPRS Bhakti Sumekar dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat, yang tidak hanya semata melalui kinerja bisnis dan keuangan, namun juga melalui pelaksanaan CSR. BPRS Bhakti Sumekar ingin terus tumbuh dan menjadi besar bukan hanya dari aspek keuangan, namun juga dengan memberikan manfaat dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Tabel. 2.1
Penyaluran Pendanaan CSR BPRS Bhakti Sumekar tahun 2016.[8]

No.	Keterangan	Nominal
1	Bantuan Pendidikan	34.150.000
2	Bantuan Kesehatan	34.197.000
3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	346.982.800
4	Bantuan santunan, Musibah, dan Bencana	28.055.600
5	Dakwah dan Pembangunan Sarana Ibadah	28.920.000
Total		472.305.400

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank di tahun 2016 difokuskan pada beberapa bidang:

[8] Sumber: BPRS Bhakti Sumekar, Laporan Tahunan 2016. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Di bidang pendidikan, BPRS Bhakti Sumekar selalu komitmen dalam mendukung segala aktivitas yang berkenaan dengan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pendidikan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa terhadap mahasiwa yang kurang mampu. Selain itu, BPRS BhaktiSumekar juga memberikan bantuan terhadap pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Di bidang kesehatan, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan perawatan ataupun tindakan medis namun memiliki dana yang terbatas. Bantuan ini diberikan kepada karyawan dan masyarakat umum yang tidak mampu. Selain itu, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan bantuan dalam bentuk pelaksanaan khitanan massal.
3. Di bidang pemberdayaan perekonomian, Program CSR dalam bidang pemberdayaan perekonomian BPRS Bhakti Sumekar memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kecil/mikro maupun pedagang kaki lima yang berada di wilayah bank. Bantuan barupa sarana dan prasarana penunjang maupun dalam bentuk pelatihan.
4. Di bidang Santunan, Musibah dan Bencana, BPRS Bhakti Sumekar konsisten dalam melakukan bantuan berupa santuan kepada masyarakat yang kurang mampu, terkena musibah maupun bencana.
5. Di bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah, BPRS Bhakti Sumekar juga masih konsisten melaksanakan program Ramadhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kerja sama dengan masjid-masjid yang berada dilokasi wilayah bank dengan melakukan pembagian takjil maupun buka bersama. Selain kegiatan dakwah, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan bantuan terhadap pembangunan/ perbaikan masjid/rumah ibadah dan juga pemberian sarana dan prasarana penunjangnya.

F. Dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) PT. BPRS Bhakti Sumekar

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep yang mana mempunyai tanggungjawab untuk menyetorkan hasil pendapatannya kepada kas daerah setiap tahun.

Dalam Peraturan Daerah Nomor: 20 Tahun 2011 Pasal 70 Ayat 2 menyebutkan: Laba bersih PT. BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajang yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

a. Deviden pemegang saham 50%
b. Cadangan umum 10%
c. Cadangan tujuan 15%
d. Dana kesejahteraan 10%
e. Jasa produksi 12.5%
f. Dana sosial 2.5%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana setoran dana Deviden BPRS Bhakti Sumekar diserahkan langsung ke Kantor Kas Daerah yang sudah diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun kontribusi PAD ke kas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Penyaluran Pendanaan CSR BPRS Bhakti Sumekar tahun 2016.[9]

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kontribusi PAD PT. BPRS Bhakti Sumekar kepada Kas Daerah 2015	5,823,637,000
2	Kontribusi PAD PT. BPRS Bhakti Sumekar kepada Kas Daerah 2016	5,938,246,000
	Total	11,761,883,000

[9] Sumber: BPRS Bhakti Sumekar, Laporan Tahunan 2016. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAN PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

BPRS Bhakti Sumekar sangat berperan aktif terhadap pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep, hal itu dibuktikan dengan eksistensinya PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam setiap kegiatan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat atau CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu membantu antar sesama dengan harta yang dimiliki perusahaan, maka 2,5% sumber dana CSR perusahaan berasal dari dana yang dicadangkan dari total laba bersih perusahaan.

CSR perusahaan tersebut berupa penyaluran pembiayaan kebajikan (Al-Qardh Hasan) dan penyaluran bantuan kepada bidang sosial yaitu dalam bentuk kegiatan kitanan masal, bantuan anak yatim, bantuan orang tua jompo, zakat, kesehatan, pengadaan fasilitas tenda pasar malam dan pembangunan tempat-tempat sampah di setiap daerah Kabupaten Sumenep. Disanping itu, penyaluran bantuan khusus kepada bidang keagamaan yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk kegiatan hari besar Islam, pembangunan masjid dan pondok pesantren, dan penyaluran bantuan kepada bidang pendidikan yaitu dalam bentuk bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi dan tidak mampu.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga sangat besar kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sumenep yaitu mencapai Rp. 5,938,246,000 pada tahun 2016. Dana tersebut telah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah sebagai wujud tanggungjawab BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Sumenep sehingga BPRS Bhakti Sumekar Sumenep wajib menyotarkan laba bersih ke kas daerah sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Dana tersebut selanjutnya dikelola oleh pemerintah daerah untuk disalurkan guna meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih baik. Penyaluran dana tersebut berupa bantuan terhadap masyarakat miskin, pengaspalan jalan pelosok, pembangunan tembok sungai, pengeboran air minum di desa.

Peran BPRS Bhakti Sumekar dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi di daaerah Sumenep, khususnya Kecamatan Gapura dengan pengalokasian dana CSR (Corporate Social Responsibility) sebesar Rp 373,371,900,- hal demikian merupakan kontribusi nyata BPRS Bhakti Sumekar terhadap kemajuan perekonomian Sumenep sangat berperan penting sehingga keberadaan BPRS Bhakti Sumekar sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan GNP (Gross National Product) atau peningkatan pendapatan kelompok miskin.

B. Peran PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah salah satu ekonomi yang menjunjung tinggi niilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dilaksanakan. Tentu dalam ekonomi syariah memiliki beberapa landasan atau dasar hukum yang menopang dan mengawasi dalam kinerjanya. Prinsip dasar ekonomi syariah antara lain; tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Penyaluran berupa meningkatkan UMKM masyarakat Sumenep dengan memberikan lapangan kerja atau memberikan modal bisnis.

Prinsip dasar ekonomi syariah tersebut telah dipraktekkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Gapura terlihat dari kegiatan rutinitas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam membantu masyarakat Gapura antara lain; Khitanan massal setiap tahun, Jum'at barokah yang dilakukan setiap minggu dengan pembagian sembako dan uang santunan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti janda, anak yatim dan lain sebagainya, Qurban sapi setiap tahun disalurkan kepada masjid dan yayasan, dan bulan bakti gotong royong dan hari gerak PKK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan diatas meupakan kegiatan rutinitas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, ada juga kegiatan yang dilakukan secara kondisional apabila dianggap perlu dengan adanya ketentuan tertentu sebelumnya, misalnya ada permohonan bantuan renovasi masjid dari lembaga atau yayasan lalu proposal permohonan itu mendapatkan disposisi dari direktur utama, maka PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana CSR sesuai yang dibutuhkan di proposal tersebut.

Selain itu dalam proses penyaluran dana sosial atau dana CSR, BPRS Bhakti Sumekar juga berkerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Lingkungan Hidup untuk membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan dana pendidikan, bantuan dana kesehatan, dan pengadaan tempat sampah dan pot bunga dijalan.

Wujud perspektif ekonomi syariah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bukan hanya berbentuk kagiatan keagamaan dan kemasyarakatan tapi juga termaktub dalam visi dan misi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Visi tersebut berbunyi "Terwujudnya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya" disamping itu cermin dari perspektif ekonomi syariah juga tertuang di misi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu "Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah", "Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah" dan "Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi peran PT. BPRS bhakti sumekar dalam upaya pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah sudah selesai ditataran visi dan misi sekaligus program dan kegiatan sosial kemasyrakatan dan juga tanggungjawab terhadap lingkungan ditandai dengan penyaluran dana CSR BPRS Bhakti Sumekaar Sumenep, sehingga dalam prakteknya segala kegiatan funding atau leanding BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah yaitu: menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah, serta menghindari kekacauan dan kerususuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS Bhakti Sumekar sangat berperan penting untuk pembangunan ekonomi masyarakat Gapura, terbukti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) total penyalurannya dalam satu tahun mencapai sebesar Rp 472.305.400,-. Sumber dana CSR tersebut diambil dari 2,5% berasal dari dana yang dicadangkan dari total laba bersih perusahaan. Penyaluran bantuan ini merupakan suatu wujud tanggung jawab BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Gapura, yaitu berupa bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan santunan, bantuan musibah dan bencana alam, serta bantuan di bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah.
2. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga sangat berkontribusi besar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sumenep yaitu Rp. 5,938,246,000-, pada tahun 2016. Dana tesebut disetor kepada kas daerah Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya dialokasikan kepada pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus senantiasa semangat dalam meningkatkan kinerja usahanya demi tercapainya kesejahteraan Kabupaten Sumenep kedepannya.

Selain dari itu pemerintah Kabupaten Sumenep selaku pemegang kendali juga harus bijaksana dalam menentukan peraturan daerah sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bisa terealisasikan secara merata tidak hanya berpusat di kawasan kota Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Al-Maududi, Abul A'la, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamni*, Jakarta : Media Dakwah, 1985.

Arsyad Lincolin, *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Baswir, Revrisond, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Cahyono Budi, *Analisis Pembangunan Daerah*, Semarang: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Dawabah Muhammad Asyraf, *Al Iqtishad al Islamy Madkholun wa Manhajun,* Darussalam, Kairo, 2010.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003.

Dewi,Gamela, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah Di Indonesia,* Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hartono, Budiantoro, Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008).

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

HR, Muhammad Nafik, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.

Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Malang: UIN Malang Press, 2009.

Kuncoro Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia,* Jakarta: Sinar Jaya, 2003.

Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: UII PRESS, 2000.

Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe'I, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: PT. Remaja Karya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nawawi, Ismail, *Pembangunan dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya,* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian,* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Ndrah Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Nengsih, Novia, *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Noor, Juliyansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011.

Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Petriyati, Nindy, *Analisis potensi sektor ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan,* Universitas Pembangunan Nasional – VETERAN.

Prawiro Ruslan, *Ekonomi Sumber Daya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press,1995.

Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Qardhawi Yusuf, *Retorika Islam, Khalifah,* Jakarta: Al-Kautsar Group, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rudianto Doddy, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Di Indoensia* Jakarta: Golden Terayon, 1985.

Salim Agus. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002.

Saud Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terj. Achmad Rais*, Jakarta : Gema Insani Press, 1991.

Shidqi, Alvi, *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi,* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Simanjuntak Payaman J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: FEUI, 2003.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Ciptra, 2002.

Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika, 1985.

Sumodiningrat Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Selemba Empat, 2000.

Suryana, *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan,* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.

T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarigan Robinson*, Perencanaan Pembangunan Wilayah, (Jakarta: Bumii Aksara*, 2007.

Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Parieara,1992.

Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),* Jakarta: Mizan,1999.

Yuliadi Chapra Imamudin, *Ekonomi Islam,* Yogyakarta: LPII, 2001.

Yusanto Muhammad Ismail, *Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas bisnis Islami,* Jakarta: Gema Insani, 1998.

https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/latar-belakang

https://www.bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/permodalan

https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/status-hukum-dan-riwayat

https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/struktur-organisasi

https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-0311/visi-misi

https://www.maduraterkini.com/berita-sumenep/aset-bprs-bhakti-sumekar-terbesar-ketiga-di-indonesia.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id